

APPLICATION OF THE SHANNON AND WEAVER MODEL TO REDUCE MESSAGE DISTORTION IN SECURING THE 2024 DELI SERDANG ELECTION

PENERAPAN MODEL SHANNON AND WEAVER UNTUK MENGURANGI DISTORSI PESAN DALAM PENGAMANAN PEMILU 2024 DELI SERDANG

Romi Syahputra^{1a(*)} Syukur Kholil^{2b}

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^a romi4004243015@uinsu.ac.id

^b syukurkholil@uinsu.ac.id

(*) Corresponding Author

romi4004243015@uinsu.ac.id

How to Cite: Romi Syahputra. (2024). Penerapan Model Shannon And Weaver Untuk Mengurangi Distorsi Pesan Dalam Pengamanan Pemilu 2024 Deli Serdang doi: DOI: 10.36526/js.v3i2.4593

Abstract

Received: 05-10-2024
Revised : 20-10-2024
Accepted: 14-11-2024

Keywords:

communication;
message distortion;
Shannon and
Weaver; election
security; Deli
Serdang

The security operations for the 2024 election in Deli Serdang face significant communication challenges that risk causing message distortion, potentially undermining coordination between security personnel and the public. To address this issue, this study applies the Shannon and Weaver communication model as a framework to identify factors contributing to noise in information exchange on the ground. The research focuses on how the model's elements—such as sender, communication channels, and receiver—can interact more effectively to minimize misunderstandings. Using a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with security personnel and document analysis. Findings reveal that employing the Shannon and Weaver model aids in identifying vulnerable points that cause noise, such as message inconsistencies and limited communication media. By improving feedback mechanisms and minimizing sources of interference, coordination in election security can be substantially enhanced. This study concludes that understanding the principles of communication models is essential to ensuring message clarity and bolstering security responsiveness during election operations.

PENDAHULUAN

Pengamanan pemilu kepala daerah (Pilkada) merupakan elemen krusial dalam memastikan stabilitas dan keberhasilan proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam kondisi politik yang dinamis dan beragam seperti di Deli Serdang (Setiawan et al., 2023; Suwondo, 2020; Zendrato et al., 2024). Keberhasilan Pilkada bukan hanya ditentukan oleh prosedur pemilihan yang adil dan terbuka, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Polresta Deli Serdang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengamanan, memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi keamanan dan menjalankan komunikasi yang efektif selama Pilkada. Namun, terdapat kendala-kendala dalam komunikasi yang sering kali berdampak pada proses pengamanan, terutama terkait distorsi pesan atau gangguan (*noise*) dalam komunikasi. Distorsi ini memerlukan solusi yang tepat untuk memastikan kelancaran komunikasi antar-anggota Polresta dan koordinasi yang efektif dengan masyarakat (Ramadhan, 2020).

Noise dalam konteks komunikasi pengamanan Pilkada dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama ketika pesan harus disampaikan secara cepat dan akurat di lapangan. Noise ini tidak hanya berupa gangguan teknis atau fisik, tetapi juga melibatkan aspek semantik, di

mana perbedaan persepsi dapat menyebabkan misinterpretasi pesan antara petugas keamanan dan masyarakat. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 12% insiden keamanan selama Pilkada 2020 disebabkan oleh gangguan komunikasi yang mencakup kesalahan penyampaian informasi dan kesulitan dalam menyampaikan instruksi dari pusat ke petugas lapangan (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif dan terstruktur untuk mengatasi tantangan tersebut (Adanlawo et al., 2021; Alsaid et al., 2024).

Model komunikasi Shannon and Weaver yang dikembangkan pada 1949 menyediakan pendekatan sistematis untuk memahami proses komunikasi yang dapat diterapkan dalam konteks pengamanan. Model ini terdiri dari komponen-komponen seperti sumber, transmisi, pesan, penerima, dan noise, yang semuanya mempengaruhi efektivitas komunikasi. Dalam konteks pengamanan Pilkada, model ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengurangi gangguan (noise) untuk menjaga kejelasan pesan di antara aparat dan memastikan pemahaman yang seragam di antara semua pihak terkait. Dengan menerapkan model ini, Polresta Deli Serdang diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengurangi potensi gangguan yang dapat menghambat komunikasi yang efektif (Habibah, 2023).

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat kompleksitas Pilkada 2024, di mana terdapat peningkatan jumlah calon dan keragaman aspirasi politik yang dapat meningkatkan potensi konflik di lapangan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada 2024 akan melibatkan lebih dari 270 daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki populasi besar dan tingkat partisipasi politik yang tinggi (KPU, 2024). Dengan konteks demikian, komunikasi yang efektif dan bebas dari gangguan sangat penting agar informasi pengamanan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas model Shannon and Weaver dalam konteks pengamanan Pilkada, dengan fokus pada upaya Polresta Deli Serdang dalam mengurangi noise untuk memastikan kelancaran komunikasi (Agustri et al., 2021).

Dalam konteks pengamanan Pemilu, khususnya Pilkada, komunikasi yang efektif antara aparat keamanan dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan terciptanya kondisi yang kondusif dan tertib. Model komunikasi Shannon dan Weaver memberikan kerangka kerja yang membantu memahami proses komunikasi dan gangguan (*noise*) yang sering kali menghambat efektivitas komunikasi tersebut. Di Deli Serdang, distorsi pesan menjadi isu krusial mengingat kompleksitas sosial dan politik di wilayah ini yang dapat memengaruhi keberhasilan pengamanan pemilu. Distorsi dalam komunikasi, seperti gangguan teknis akibat sinyal komunikasi yang lemah dan noise semantik akibat perbedaan interpretasi pesan di antara petugas, sering kali mengakibatkan miskomunikasi dan berpotensi menciptakan konflik di lapangan (Sukanto & Purnomo, 2022; Gunawan, 2021).

Gangguan komunikasi ini bukan hanya menghambat kelancaran koordinasi antarpetugas, tetapi juga berdampak langsung pada respons keamanan, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan model Shannon dan Weaver dalam mengidentifikasi sumber-sumber noise spesifik yang terjadi dalam pengamanan Pemilu di Deli Serdang dan memahami dampaknya terhadap efektivitas komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor gangguan komunikasi tersebut dan memberikan rekomendasi praktis agar informasi keamanan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat di tengah situasi pemilu yang dinamis dan sensitif (Santoso, 2019).

Teori komunikasi Shannon and Weaver yang menyoroti elemen-elemen gangguan dalam proses komunikasi menjadi sangat relevan dalam situasi ini (Rahmawati & Sujono, 2021). Dengan menggunakan model ini, Polresta Deli Serdang dapat mengidentifikasi sumber-sumber noise yang umum terjadi selama pengamanan, seperti noise teknis akibat kendala sinyal dan noise semantik yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi antar-anggota. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan noise yang efektif dapat meningkatkan pemahaman pesan hingga 30%, yang sangat signifikan dalam menjaga ketertiban selama proses Pilkada. Hal ini mendukung pentingnya model Shannon and Weaver dalam memastikan kejelasan dan akurasi pesan dalam konteks

pengamanan Pilkada (Mariska et al., 2021).

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek-aspek eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan model Shannon and Weaver, seperti tingkat literasi masyarakat, dukungan infrastruktur komunikasi, serta kondisi sosial-politik di Deli Serdang. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam menentukan cara-cara optimal untuk mengurangi noise pada pengamanan Pilkada. Penerapan model ini dalam konteks Pilkada Deli Serdang dapat memberikan panduan praktis dalam meningkatkan keefektifan komunikasi keamanan di tengah tantangan sosial-politik yang kompleks (Tung et al., 2021).

Novelty dari penelitian ini terletak pada penerapan model Shannon and Weaver secara spesifik dalam konteks pengamanan Pilkada di Indonesia, yang hingga kini masih jarang dibahas dalam penelitian ilmiah. Sementara studi sebelumnya lebih banyak membahas komunikasi antar-anggota keamanan dalam konteks umum, belum ada penelitian yang secara mendalam mengkaji pengurangan distorsi pesan dalam situasi pengamanan Pilkada dengan pendekatan model Shannon and Weaver. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang sangat relevan bagi lembaga keamanan dalam mengelola komunikasi yang efisien di lapangan (De Jager, 2023).

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi *noise*, tetapi juga mengusulkan langkah-langkah mitigasi berbasis pada elemen-elemen dalam model Shannon and Weaver. Misalnya, melalui optimalisasi encoding dan decoding pesan, penggunaan saluran yang lebih stabil, serta pengembangan feedback yang adaptif, Polresta Deli Serdang dapat meningkatkan kualitas komunikasi selama pengamanan Pilkada (Juanda & Juanda, 2022). Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Polresta Deli Serdang untuk memastikan efektivitas komunikasi mereka selama pengamanan Pilkada 2024.

Dengan penelitian ini, diharapkan Polresta Deli Serdang mampu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal mereka, mengurangi potensi noise yang dapat menyebabkan misinterpretasi pesan, serta memperkuat koordinasi di antara aparat dan masyarakat selama Pilkada berlangsung. Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi lembaga keamanan, tetapi juga memperkaya literatur akademis tentang penerapan model komunikasi Shannon and Weaver dalam konteks pengamanan Pilkada, yang jarang dilakukan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan komunikasi dalam pengamanan Pilkada 2024 dan menjadi panduan bagi lembaga keamanan lain dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks keamanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami penerapan model komunikasi Shannon and Weaver dalam pengamanan Pilkada 2024 oleh Polresta Deli Serdang (Fu et al., 2020). Jenis penelitian ini dipilih untuk membantu analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi, terutama dalam upaya mengurangi noise atau distorsi pesan yang dapat menghambat koordinasi pengamanan (Getchell et al., 2023). Pendekatan deskriptif membantu peneliti menggambarkan proses komunikasi secara terperinci serta menyoroti bagaimana Polresta Deli Serdang berupaya mengoptimalkan komunikasi antar-anggota dan dengan masyarakat selama Pilkada.

Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dipilih karena tingginya kompleksitas sosial-politik yang memengaruhi pelaksanaan Pilkada. Sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dan beragam, Deli Serdang memberikan konteks ideal untuk menganalisis dinamika komunikasi pengamanan. Lokasi ini juga membantu peneliti mendapatkan data lapangan yang relevan terkait penerapan model Shannon and Weaver dalam mengatasi gangguan komunikasi pada situasi keamanan yang menuntut respons cepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan-informan utama, termasuk anggota Polresta Deli Serdang yang terlibat dalam pengamanan Pilkada, serta tokoh

masyarakat yang berinteraksi langsung dengan aparat selama proses pemilu. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati bagaimana pola komunikasi berlangsung selama pengamanan, sementara dokumentasi mencakup laporan resmi dan catatan operasional Polresta Deli Serdang terkait prosedur pengamanan Pilkada. Data dari berbagai sumber ini diharapkan membantu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan komunikasi yang dihadapi serta strategi yang diterapkan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diidentifikasi berdasarkan tema-tema kunci terkait model komunikasi Shannon and Weaver. Proses analisis dimulai dari transkripsi data wawancara, pengkodean, hingga identifikasi tema yang relevan, seperti noise, saluran komunikasi, serta efektivitas feedback. Temuan dari masing-masing tema kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan model ini dalam konteks pengamanan Pilkada. Hasil analisis tematik ini diharapkan dapat membantu menjelaskan strategi Polresta Deli Serdang dalam mengurangi noise dan menjaga keefektifan komunikasi selama proses pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Sumber Gangguan (Noise) dalam Komunikasi Pengamanan Pilkada di Polresta Deli Serdang

Pengamanan Pilkada di wilayah Deli Serdang menghadapi tantangan komunikasi yang signifikan, dengan berbagai jenis gangguan (noise) yang dapat menghambat penyampaian pesan yang efektif antara aparat keamanan dan masyarakat. Gangguan atau noise ini mencakup faktor teknis, lingkungan, serta perbedaan interpretasi atau noise semantik. Salah satu informan, seorang perwira pengamanan di Polresta Deli Serdang, menyatakan bahwa, "Gangguan teknis seperti sinyal yang lemah sering kali membuat koordinasi di lapangan terganggu. Instruksi yang diberikan tidak selalu diterima dengan jelas, terutama di area yang jauh dari pusat komando." Hal ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur komunikasi yang baik untuk mendukung koordinasi lapangan, khususnya pada Pilkada yang melibatkan banyak titik pengamanan.

Noise teknis memang menjadi salah satu kendala utama. Berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan, sinyal komunikasi yang tidak stabil sering kali menghambat koordinasi antar-pos pengamanan. Selain itu, interferensi gelombang radio juga kerap terjadi, terutama ketika peralatan komunikasi harus berbagi frekuensi dengan perangkat lain di sekitar lokasi. Seorang petugas keamanan di lapangan mengungkapkan, "Saat sinyal terganggu, ada banyak instruksi yang hilang atau tidak tersampaikan dengan tepat, sehingga ada potensi miskomunikasi dan penanganan yang terlambat." Dengan demikian, noise teknis menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam komunikasi pengamanan Pilkada.

Selain kendala teknis, noise lingkungan juga kerap menjadi gangguan signifikan selama proses pengamanan. Kondisi lapangan di Deli Serdang, seperti suara bising dari kerumunan warga, aktivitas transportasi, serta kondisi geografis yang menantang, menambah kompleksitas pengamanan. "Banyak titik pengamanan yang padat aktivitas sehingga suara bising menghambat penyampaian perintah, apalagi jika kita berada di lokasi yang ramai. Kadang perintah tidak didengar dengan jelas oleh anggota," ujar salah seorang petugas keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebisingan lingkungan berperan besar dalam mengganggu kelancaran komunikasi, terutama saat terjadi insiden yang memerlukan respons cepat.

Di samping noise teknis dan lingkungan, noise semantik atau gangguan akibat perbedaan interpretasi pesan menjadi faktor yang signifikan dalam pengamanan Pilkada. Perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, serta pemahaman instruksi yang bervariasi di antara anggota dan masyarakat menyebabkan kesalahpahaman yang cukup sering. Salah seorang petugas menyatakan, "Ada situasi di mana instruksi atau istilah yang digunakan tidak dipahami secara seragam oleh anggota yang bertugas, terutama jika ada yang baru ditugaskan. Ini sering kali menyebabkan perbedaan cara penanganan di lapangan." Noise semantik ini mempertegas

kebutuhan akan standar komunikasi yang seragam agar instruksi dapat dipahami dengan benar di semua tingkatan.

Selain itu, noise sosial juga ditemukan sebagai tantangan yang cukup berpengaruh. Noise sosial terjadi ketika persepsi masyarakat terhadap tindakan aparat berbeda dari maksud asli pesan atau instruksi. Salah satu informan dari masyarakat menyatakan, "Ada kalanya kami salah paham terhadap arahan aparat, terutama jika mereka terlihat tegas. Kami berpikir itu berlebihan, padahal mungkin hanya sesuai SOP mereka." Perbedaan persepsi ini sering kali menyebabkan ketegangan antara aparat dan masyarakat, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih baik di antara kedua belah pihak.

Berikut tabel yang menggambarkan jenis noise yang dihadapi serta dampak yang diungkapkan oleh para informan:

Tabel 1. Noise Yang dihadapi saat Pilkada

JENIS NOISE	SUMBER	DAMPAK PADA KOMUNIKASI	ARGUMENTASI INFORMAN
NOISE TEKNIS	Sinyal Komunikasi Yang Lemah	Pesan Sering Kali Terputus, Menghambat Koordinasi Lapangan	"Instruksi Sering Kali Tidak Diterima Dengan Jelas Di Area Jauh" - Perwira Polresta
NOISE LINGKUNGAN	Suara Bising Dari Kerumunan	Pesan Sulit Didengar, Terutama Pada Perintah Darurat	"Di Lokasi Ramai, Perintah Tidak Terdengar Jelas Oleh Anggota." - Petugas Lapangan
NOISE SEMANTIK	Interpretasi Pesan Yang Berbeda	Menimbulkan Miskomunikasi Di Antara Anggota Polresta	"Instruksi Atau Istilah Kadang Tak Dipahami Seragam Oleh Anggota." - Petugas Lapangan
NOISE TEKNOLOGI	Interferensi Gelombang Radio	Mengganggu Kualitas Sinyal, Mengakibatkan Pesan Tidak Jelas	"Banyak Instruksi Hilang Atau Terlambat Diterima Karena Interferensi." - Petugas Lapangan
NOISE SOSIAL	Perbedaan Persepsi Masyarakat	Menimbulkan Ketegangan Dan Kesalahpahaman Dengan Aparat	"Kadang Kami Salah Paham Terhadap Arahan, Terlihat Berlebihan." - Informan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis distorsi komunikasi, seperti noise teknis dan noise semantik, secara signifikan memengaruhi efektivitas komunikasi dalam pengamanan Pemilu di Deli Serdang. Distorsi ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengaitkan temuan dengan teori komunikasi Shannon dan Weaver, terutama pada aspek semantik dan pragmatik yang memengaruhi interpretasi pesan. Noise teknis yang timbul dari sinyal komunikasi yang lemah, serta noise semantik yang muncul akibat perbedaan persepsi atau interpretasi pesan antara petugas dan masyarakat, merupakan elemen penting yang sesuai dengan kerangka teori Shannon dan Weaver dalam analisis komunikasi (Shannon & Weaver, 1949; Wibowo, 2020).

Dengan menggunakan elemen-elemen model Shannon dan Weaver, seperti saluran komunikasi, encoding, dan decoding, penelitian ini dapat mengidentifikasi mekanisme gangguan tersebut dan bagaimana pendekatan yang lebih terstruktur dapat mengurangi dampak negatif noise pada efektivitas pengamanan pemilu. Pembahasan ini mendukung argumen dari penelitian sebelumnya bahwa pengurangan noise dapat membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan informasi dalam situasi darurat (Rachman, 2021). Mengaitkan hasil penelitian dengan teori komunikasi yang relevan akan memberikan konteks yang lebih kuat pada analisis dan memperkaya kontribusi akademis dari penelitian ini.

Pembahasan

Gangguan teknis ini tidak hanya memperlambat penyampaian pesan, tetapi juga meningkatkan potensi kesalahan dalam penanganan insiden di lapangan. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan perangkat komunikasi, terutama di daerah yang terisolasi. Seorang petugas menambahkan, "Ketika interferensi terjadi, kami sering kali harus mencari alternatif seperti pesan tertulis atau pengulangan perintah secara manual, yang sangat memakan waktu." Selain itu, noise lingkungan yang sering muncul dari kerumunan masyarakat juga menjadi fokus penting, terutama di daerah padat. Para petugas mengungkapkan bahwa noise ini membuat mereka kesulitan memberikan instruksi yang tepat pada waktu yang kritis. "Bahkan dalam situasi darurat, kita harus berteriak untuk memastikan perintah terdengar, dan ini tidak selalu efektif," tambah seorang informan. Ini mengindikasikan bahwa kondisi fisik di lapangan turut mempengaruhi ketepatan respons dan tindakan pengamanan.

Untuk mengatasi noise semantik, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menyamakan persepsi dan bahasa yang digunakan oleh anggota Polresta. Beberapa informan menyebutkan perlunya pelatihan rutin untuk menyamakan pemahaman istilah dalam komunikasi pengamanan Pilkada. "Dengan pelatihan, anggota baru atau yang belum terbiasa dapat lebih memahami makna istilah yang sering digunakan dalam pengamanan," ujar seorang perwira. Pelatihan ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat efektivitas komunikasi.

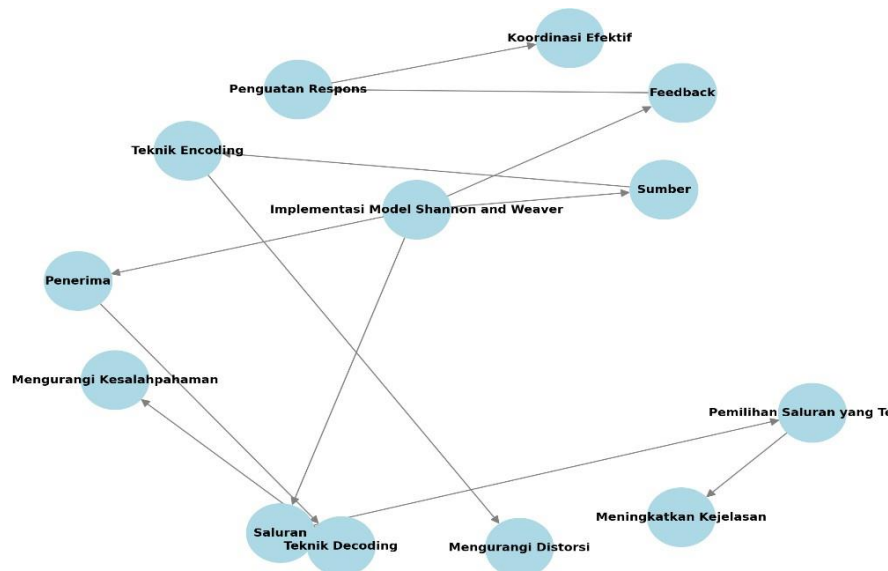
Noise sosial juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Perbedaan persepsi antara aparat dan masyarakat terkait tindakan pengamanan kadang menimbulkan konflik. Hal ini mendorong Polresta untuk menerapkan pendekatan yang lebih ramah dalam menyampaikan instruksi kepada masyarakat. "Kita mencoba komunikasi yang lebih bersahabat agar masyarakat tidak salah paham terhadap tindakan aparat," jelas seorang perwira Polresta. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat serta mengurangi potensi gangguan komunikasi yang diakibatkan oleh noise sosial. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa setiap jenis noise yang dihadapi memiliki dampak signifikan pada kelancaran komunikasi selama pengamanan Pilkada. Identifikasi jenis noise ini menjadi dasar bagi Polresta Deli Serdang untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mengurangi potensi gangguan.

Implementasi Model Shannon and Weaver dalam Mengelola Distorsi Pesan pada Pengamanan Pilkada

Implementasi model Shannon and Weaver dalam pengelolaan distorsi pesan pada pengamanan Pilkada di Polresta Deli Serdang sangat penting untuk menjaga efektivitas komunikasi yang bersifat strategis dan mendesak. Dalam suasana Pilkada yang rawan konflik, aparat kepolisian perlu memastikan bahwa semua informasi keamanan disampaikan dengan jelas dan tanpa hambatan. Model Shannon and Weaver membantu mengelola komunikasi secara sistematis dengan menekankan elemen-elemen penting seperti sumber, pesan, saluran, penerima, dan feedback. Ketika setiap elemen ini berfungsi secara optimal, distorsi pesan dapat diminimalkan, memungkinkan proses komunikasi berjalan efektif, dan mengurangi potensi kesalahpahaman di antara petugas dan masyarakat.

Polresta Deli Serdang mengidentifikasi beberapa jenis noise atau gangguan komunikasi yang dapat menghambat efektivitas komunikasi selama pengamanan Pilkada. Beberapa sumber gangguan tersebut meliputi kendala teknis, noise lingkungan seperti kebisingan di tempat-tempat ramai, serta noise semantik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman atas pesan di antara petugas atau antara petugas dan masyarakat. Dengan menggunakan kerangka model Shannon and Weaver, Polresta dapat meninjau tiap elemen komunikasi secara lebih rinci, mengidentifikasi sumber-sumber gangguan ini, dan mencari cara untuk meminimalkan dampaknya.

Di bawah ini adalah mindmap yang menggambarkan implementasi model Shannon and Weaver dalam mengelola distorsi pesan di pengamanan Pilkada. Diagram ini memperlihatkan bagaimana setiap komponen komunikasi sumber, saluran, penerima, dan feedback berfungsi untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif. Teknik encoding yang baik pada sumber, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, teknik decoding yang efektif pada penerima, serta penguatan respons dalam feedback adalah beberapa strategi yang diterapkan untuk mengurangi gangguan komunikasi.



Gambar 1. Implementasi Model Shannon and Weaver dalam Mengelola Distorsi Pesan pada Pengamanan Pilkada

Sumber informasi atau titik awal dari pesan adalah komponen utama yang berperan dalam menentukan kejelasan informasi yang akan disampaikan. Dalam konteks pengamanan Pilkada, sumber informasi berasal dari pusat komando yang memberikan instruksi kepada anggota di lapangan. Agar pesan tersampaikan dengan baik, proses encoding harus menggunakan bahasa dan istilah yang jelas dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Penerapan encoding yang efektif sangat penting agar pesan yang disampaikan kepada anggota tidak mengandung makna ganda dan dapat dipahami tanpa interpretasi yang salah.

Saluran komunikasi atau media yang digunakan untuk mengirim pesan juga memiliki peran signifikan dalam mengurangi noise. Dalam konteks ini, Polresta Deli Serdang menggunakan berbagai media, seperti radio dan perangkat komunikasi seluler, untuk menyampaikan informasi kepada anggotanya. Pemilihan perangkat yang tepat dan peningkatan sinyal komunikasi di area yang rentan terhadap gangguan teknis adalah beberapa cara untuk meminimalkan gangguan teknis. Saluran komunikasi yang optimal akan mengurangi potensi noise teknis dan menjamin bahwa pesan disampaikan dengan jelas tanpa hambatan.

Proses decoding di sisi penerima sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dipahami dengan benar sesuai dengan instruksi. Jika proses decoding tidak dilakukan dengan baik, pesan dapat terdistorsi dan menyebabkan miskomunikasi di lapangan. Salah satu bentuk noise semantik yang

sering terjadi adalah perbedaan interpretasi terhadap perintah, terutama pada istilah-istilah teknis. Dengan memberikan pelatihan kepada anggota terkait pemahaman dan decoding pesan, Polresta Deli Serdang dapat memastikan bahwa instruksi diterima dengan interpretasi yang benar dan mengurangi potensi gangguan.

Feedback atau respons dari penerima ke sumber juga menjadi aspek krusial dalam model ini, terutama dalam konteks pengamanan Pilkada. Feedback memungkinkan sumber untuk mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan baik oleh penerima. Polresta Deli Serdang mengoptimalkan feedback melalui komunikasi dua arah dengan anggotanya di lapangan, sehingga mereka dapat segera mengetahui jika ada pesan yang tidak jelas atau membutuhkan klarifikasi. Feedback ini juga memudahkan Polresta dalam melakukan penyesuaian instruksi jika situasi di lapangan berubah secara mendadak.

Noise sosial dan semantik sering kali menjadi tantangan dalam pengamanan Pilkada, terutama karena perbedaan persepsi antara aparat keamanan dan masyarakat. Dalam situasi tertentu, masyarakat dapat salah memahami maksud dari tindakan keamanan yang dilakukan, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih terbuka dan bersahabat. Dengan mempertimbangkan faktor sosial dalam penyampaian pesan, Polresta dapat lebih efektif dalam mencegah konflik dan meningkatkan rasa percaya masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan model Shannon and Weaver memungkinkan Polresta Deli Serdang untuk memahami setiap elemen komunikasi dan mengidentifikasi area-area di mana potensi gangguan mungkin terjadi. Dengan memperhatikan elemen-elemen seperti encoding, saluran komunikasi, decoding, dan feedback, Polresta dapat mengelola noise yang sering muncul dalam situasi pengamanan. Optimalisasi model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi selama Pilkada dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Deli Serdang.

Strategi Mitigasi Gangguan Komunikasi dalam Pengamanan Pilkada oleh Polresta Deli Serdang

Implementasi model Shannon and Weaver dalam pengelolaan distorsi pesan pada pengamanan Pilkada sangat penting bagi Polresta Deli Serdang. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan memastikan informasi keamanan tersampaikan dengan jelas. Model ini menyediakan kerangka teoretis untuk memahami dan memitigasi noise yang dapat menghambat proses komunikasi, seperti gangguan teknis, lingkungan, maupun semantik yang sering kali muncul dalam situasi pengamanan.

Optimalisasi saluran komunikasi menjadi salah satu strategi utama Polresta Deli Serdang dalam mengurangi noise. Pemilihan perangkat komunikasi yang handal serta penempatan sinyal tambahan di titik-titik strategis membantu memastikan stabilitas sinyal. Langkah ini dirancang untuk meminimalkan interferensi teknis sehingga instruksi dapat tersampaikan dengan jelas kepada seluruh petugas di lapangan, termasuk di area yang memiliki keterbatasan akses jaringan.

Peningkatan kemampuan encoding dan decoding pesan di kalangan petugas pengamanan dilakukan melalui pelatihan teknis yang komprehensif. Polresta mengadakan pelatihan yang memfokuskan pada penyusunan dan penyampaian pesan secara sederhana dan tepat. Prosedur ini mengurangi risiko misinterpretasi pesan yang mungkin terjadi akibat perbedaan pemahaman antar petugas di lapangan. Kejelasan bahasa dan pemilihan kata yang sesuai sangat diperhatikan untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan baik.

Penguatan konteks sosial-budaya dalam komunikasi juga diterapkan sebagai langkah strategis untuk mengurangi noise sosial. Pelatihan berbasis pemahaman lokal diberikan kepada aparat agar mereka lebih mengenal dan menghargai norma serta adat setempat. Pendekatan ini membantu meminimalkan ketegangan antara aparat dan masyarakat, terutama saat pelaksanaan pengamanan Pilkada yang memerlukan interaksi langsung.

Saluran komunikasi alternatif menjadi opsi penting untuk mengatasi gangguan teknis yang tidak terduga. Polresta menyediakan perangkat cadangan, seperti radio VHF dan walkie-talkie, yang

digunakan saat jaringan utama mengalami gangguan. Perangkat ini memberikan fleksibilitas komunikasi, memungkinkan petugas untuk tetap terhubung dengan komando pusat tanpa terganggu oleh masalah teknis. Kombinasi perangkat komunikasi ini membantu menjaga kelancaran aliran informasi di lapangan.

Feedback berjenjang menjadi solusi untuk memastikan bahwa pesan telah dipahami dan diikuti dengan benar. Sistem pelaporan ini melibatkan umpan balik secara bertahap, dari petugas lapangan kepada atasan hingga pusat komando. Dengan struktur ini, Polresta dapat memverifikasi pemahaman petugas terhadap instruksi dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana pengamanan. Langkah ini menghindari kesalahpahaman yang dapat berpotensi menghambat keamanan.

Feedback juga memungkinkan Polresta untuk melakukan evaluasi secara real-time terhadap respons petugas di lapangan. Melalui laporan berkala, pusat komando dapat mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pemahaman instruksi dan segera melakukan koreksi. Sistem ini bukan sekadar umpan balik, tetapi menjadi alat evaluasi kualitas komunikasi yang memungkinkan perbaikan langsung dan respons cepat dalam situasi mendesak.

Komunikasi non-verbal, seperti isyarat tangan dan tanda visual, digunakan untuk mengatasi situasi lapangan yang sulit. Dalam kondisi dengan tingkat kebisingan tinggi atau di lokasi yang sinyalnya tidak stabil, metode ini mempermudah penyampaian instruksi dengan cepat tanpa harus menggunakan kata-kata. Pendekatan ini sangat efektif dalam menjaga respons yang tepat waktu dan akurat di lapangan, terutama dalam situasi yang memerlukan koordinasi cepat.

Komunikasi yang bersahabat dan transparan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi noise sosial. Polresta menerapkan pendekatan yang lebih humanis untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, memberikan penjelasan mengenai prosedur keamanan secara terbuka. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi selama proses pengamanan.

Penyampaian informasi melalui media lokal juga menjadi langkah proaktif untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait pengamanan Pilkada. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan jelas, Polresta dapat memastikan masyarakat memahami tujuan dan peran aparat keamanan. Langkah ini membantu mencegah munculnya rumor atau informasi yang keliru, yang sering menjadi penyebab noise sosial dalam situasi yang melibatkan aparat dan warga.

Pendekatan yang komprehensif dalam mengelola noise pada setiap elemen komunikasi ini memberikan kerangka kerja yang efektif bagi Polresta Deli Serdang. Dengan memaksimalkan fungsi encoding, saluran komunikasi, decoding, dan feedback, Polresta tidak hanya memastikan kelancaran komunikasi internal, tetapi juga menciptakan keterhubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Strategi ini memperkuat ketahanan komunikasi dan membantu menjaga stabilitas keamanan selama proses Pilkada berlangsung.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan model Shannon and Weaver dalam mengelola distorsi pesan selama pengamanan Pilkada oleh Polresta Deli Serdang. Dengan mengoptimalkan komponen-komponen utama dalam komunikasi, seperti sumber, saluran, penerima, dan feedback, Polresta berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi antar-aparat dan masyarakat di lapangan. Penerapan model ini menunjukkan bahwa penanganan noise atau gangguan komunikasi tidak hanya memerlukan upaya teknis, tetapi juga strategi yang komprehensif yang mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan semantik yang dapat memengaruhi persepsi penerima pesan.

Analisis terhadap noise atau gangguan komunikasi yang dihadapi selama pengamanan Pilkada menunjukkan bahwa gangguan teknis, lingkungan, dan semantik sering kali menghambat efektivitas penyampaian pesan. Dengan mengidentifikasi jenis noise ini, Polresta mampu merancang strategi mitigasi yang tepat, seperti penggunaan saluran komunikasi alternatif, pelatihan teknis bagi

petugas, serta pemanfaatan feedback dua arah. Strategi-strategi ini membantu memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan dipahami dengan benar oleh penerima, baik aparat di lapangan maupun masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan model Shannon and Weaver secara khusus dalam konteks Pilkada dapat mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara aparat dan masyarakat. Noise sosial, yang sering kali muncul akibat perbedaan pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap tindakan keamanan, berhasil diatasi melalui komunikasi yang lebih transparan dan pendekatan bersahabat. Selain itu, penyampaian informasi melalui media lokal terbukti efektif dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap peran Polresta dalam pengamanan Pilkada.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan model komunikasi Shannon and Weaver dalam konteks keamanan publik. Dengan mengadaptasi elemen-elemen model ini, Polresta Deli Serdang dapat meningkatkan kualitas komunikasi yang berfokus pada kejelasan, ketepatan, dan kecepatan respons di lapangan. Penerapan model ini tidak hanya relevan bagi pengamanan Pilkada, tetapi juga dapat dijadikan panduan bagi lembaga keamanan lainnya dalam mengelola komunikasi di situasi kompleks yang memerlukan koordinasi yang efektif di tengah tantangan sosial dan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adanlawo, E. F., Reddy, M. M., & Rugbeer, H. (2021). Intercultural business communication: The implications of language barriers. *Psychology and Education Journal*, 58(5), 6281–6290.
- Agustri, Sijaya, A., & Usman. (2021). *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2004 di Indonesia*. Samudera Biru.
- Alsaid, M., Panguluri, S. P., & Hawamdeh, S. (2024). Combating misinformation on social media using social noise and social entropy as a measure of uncertainty. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 61(1), 25–35. <https://doi.org/10.1002/pra2.1005>
- Angkotasan, R. M., & Rahman, A. (2024). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan. *eprints.ipdn.ac.id*.
- Arifin, M. (2021). *Manajemen Pendidikan Masa Kini: Dilengkapi Pengalaman Kepala Sekolah dan Hasil Observasi Mahasiswa*. books.google.com.
- De Jager, S. (2023). Semantic noise in the Winograd Schema Challenge of pronoun disambiguation. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–10.
- Fu, A., Zhang, Z., Zheng, J., Yue, T., Lin, Z., Wu, N., & Huang, X. (2020). Qualitative research on the endogenous power mechanism for poverty elimination. *Acta Psychologica Sinica*, 52(1), 66.
- Getchell, K., Dubinsky, J., & Lentz, P. (2023). A critique of transmission communication models in introductory management and organizational behavior textbooks. *Journal of Management Education*, 47(5), 477–504. <https://doi.org/10.1177/10525629231182156>
- Habibah, P. (2023). Peran gerakan sosial dalam transformasi politik: Tinjauan atas pemogokan dan aksi massa. *Literacy Notes*, 1(2).
- Hakim, R. G. (n.d.). Kajian hukum penanganan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 di Kota Binjai (Studi penelitian di Bawaslu Kota Binjai). *Eprints.Pancabudi.Ac.Id*.
- Hutasuhut, A. R. F., & Abduh, R. (2022). Dampak hukum keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyidikan di kepolisian sektor. *Legal Review: Journal of Law and Governance*.
- Juanda, J., & Juanda, O. (2022). Pengangkatan pejabat kepala daerah menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 192–219.
- Kusmanto, H. (2020). Peran Babinsa Kodim 0204/Ds Desa Rantau Panjang mengurangi narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

- repositori.uma.ac.id*.
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis distribusi logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 110–119.
- Pangesty, D. F. (2021). Indeks kerawanan pemilu (Election Vulnerability Index) pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019. *repository.uinsu.ac.id*.
- Rahmawati, A., & Sujono, F. K. (2021). Digital communication through online learning in Indonesia: Challenges and opportunities. *Jurnal Aspikom*, 6(1), 61–76.
- Ramadhan, W. (2020). Peran Binmas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas guna menciptakan Kamtibmas menjelang pemilu. *Police Studies Review*. <https://doi.org/10.23.97.227/index.php/psr/article/view/84>
- Rasyid, A. (2024). Survei pesanan di Pilgubsu. In *Koran Mimbar Umum*. *repository.uinsu.ac.id*.
- Setiawan, I., Jayadi, R., Saputro, A. P., Saputra, M. A., & Madiistriyatno, H. (2023). Implementasi Polmas sebagai pemberdayaan SDM Polri dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 demi terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 135–146.
- Sijaya, A. (2021). Menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. *books.google.com*.
- Simantoro, H. (2023). Peran masyarakat dalam menjaga perdamaian dan ketertiban umum pada masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *repository.uinsu.ac.id*.
- Suwondo, D. (2020). Pengalaman pilkada langsung dan kesiapan Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 54–73.
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. *books.google.com*.
- Tung, T.-Y., Kobus, S., Roig, J. P., & Gündüz, D. (2021). Effective communications: A joint learning and communication framework for multi- agent reinforcement learning over noisy channels. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 39(8), 2590–2603.
- Umeozor, S. N. (2020). Information retrieval: A communication process in the 21st-century library. *Journal of Knowledge Content Development & Technology*.
- Zendrato, V. B., Waruwu, E., Hulu, F., & Mendrofa, S. A. (2024). Strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Nias. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1–13.